

SINOPSIS

Skripsi ini berjudul **Demiliterisasi Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Megawati**, penelitian yang dilakukan penulis pada dasarnya adalah mengambil tema proses demiliterisasi yang dilakukan oleh Megawati pada masa pemerintahannya sebagai dasar bahan kajiannya. Pada rezim otoritarian-militeristik yang menjadi aktor politik dominan dalam negara dapat dipastikan militer. Sebagai aktor yang dominan militer menguasai hampir seluruh proses penyelenggaraan negara, mulai dari bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Intervensi militer dalam berbagai bidang inilah yang sering menimbulkan permasalahan ketika sipil mengambil alih pemerintahan. Militer yang pada masa sebelumnya mempunyai kekuasaan seluas-luasnya tidak akan mudah menyerahkan kekuasaan itu kepada pemerintahan sipil. Dengan berakhirnya era kekuasaan Presiden Suharto yang berasal dari militer, banyak kalangan berharap bahwa Indonesia akan segera mengakhiri masa transisi dan menuju kearah demokrasi yang seutuhnya. Usaha untuk menuju kearah demokrasi yang solid dan sustainable. Dari permasalahan diatas maka muncul pokok permasalahan bagaimana upaya proses demiliterisasi politik di Indonesia pada masa pemerintahan Megawati. ?

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-eksploratif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu. Sedangkan ciri-ciri metode deskriptif adalah : *Pertama*, memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual. *Kedua*, data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

Fokus kajian dari penelitian yang penulis paparkan disini lebih pada demiliterisasi yang dilakukan oleh Megawati. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat permasalahan diatas untuk dianalisa dalam skripsi ini. Bisa dikatakan upaya demiliterisasi yang dilakukan Megawati cenderung menggunakan strategi akomodasionis dan kompromis yang disebabkan oleh berbagai kepentingan politiknya sendiri dengan mengatasnamakan pribadi, partai, bahkan rakyat Indonesia. Hal itu akhirnya memperkuat legitimasi bahwa sipil tidak mampu memimpin dengan baik dalam menegakan supremasinya dan menyelenggarakan pemerintahan sipil yang demokratis. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa demiliterisasi politik di Indonesia pada masa pemerintahan Megawati telah gagal, bahkan setidaknya untuk mengurangi peran politik militer dan mempertegas agar posisi militer cukup dikembalikan kebarak agar menjadi militer yang profesional.

Rekomendasi utama sebagai saran untuk mewujudkan demiliterisasi TNI di Indonesia paling mendasar adalah mengubah cara berfikir militer yang ada pada posisi politisi di Indonesia, apalagi ketika militer dijadikan simbol kepahlawanan bangsa. Budaya militer dalam kehidupan politik akan merusak kehidupan politik itu sendiri dan menjadi pemicu munculnya kembali militerisasi politik yang akan menghancurkan proses demiliterisasi politik di Indonesia. Demikianlah secara singkat